

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Muindro (2008), akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga publik sebagai alat pertanggung jawaban kepada publik. Saat ini, praktik akuntansi di lembaga-lembaga publik, baik sektor pemerintah maupun non-pemerintah, semakin mendapatkan perhatian besar. Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga publik. Bastian (2010) menjelaskan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, serta proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Organisasi sektor publik dihadapkan pada tekanan untuk meningkatkan efisiensi, mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial, dan mengelolanya untuk kepentingan publik.

Dalam mengelola urusan-urusan publik, akuntansi sektor publik mengalami perkembangan menjadi disiplin ilmu yang semakin dibutuhkan. Ruang lingkupnya melibatkan badan-badan pemerintahan, organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi, universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya. Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dengan mengacu pada Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) diharuskan mengikuti standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia). Sementara itu, organisasi publik non-pemerintah mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2.2 Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah kerangka konseptual yang menggabungkan psikologi dan sosiologi untuk menjelaskan bagaimana manajer bertindak sebagai perwakilan yang bertanggung jawab atas kepentingan pemilik perusahaan. Menurut teori ini, manajer atau steward cenderung berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama dengan pemilik. Ketika kepentingan mereka tidak selaras, steward lebih cenderung untuk bekerja sama daripada menentang, karena mereka melihat hal tersebut sebagai langkah rasional untuk mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007).

Stewardship didefinisikan sebagai konteks di mana seorang manajer tidak dipacu oleh ambisi pribadi, melainkan oleh motivasi bawahan yang sejalan dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Asumsi kunci dalam teori stewardship adalah bahwa perilaku eksekutif atau pemimpin tertinggi sejalan dengan kepentingan

prinsipal dalam suatu organisasi, yang mengindikasikan bahwa stewardship berupaya untuk maksimalkan keberhasilan organisasi daripada memenuhi kepentingan pribadi (Davis, 1997). Stewardship juga menekankan pada struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan, bukan hanya mengawasi dan mengendalikan. Pada dasarnya, stewardship menegaskan bahwa seorang direktur bertindak sebagai wakil dan tidak memprioritaskan pengembangan kepentingan ekonomi pribadi, melainkan siap bertindak sepenuhnya demi kebaikan organisasi. Hubungan antara steward dan prinsipal dibangun di atas dasar kepercayaan. Pemilik sumber daya, yang disebut sebagai prinsipal, dengan segala keterbatasan, menaruh kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya tersebut kepada manajemen atau steward. Wakil stewardship kepada masyarakat tercermin dalam bentuk laporan keuangan yang mematuhi standar dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas memegang peran kunci dalam memenuhi kepuasan masyarakat, termasuk pihak pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan (Kosanke, 2019). Pengelolaan keuangan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas menuntut kinerja dan kemampuan pengelolaan yang baik dari para pemangku kepentingan. Sekali lagi, stewardship menggambarkan konsep melayani orang lain daripada memperjuangkan kepentingan pribadi (Keay, 2017).

Asumsi penting dalam teori ini adalah bahwa kesuksesan organisasi terkait erat dengan kepuasan pemilik, dan steward bertanggung jawab untuk melindungi serta memaksimalkan kekayaan perusahaan. Meskipun fokus pada kebutuhan intrinsik tidak mudah diukur, teori ini mengakui bahwa reward yang bersifat tidak langsung, seperti kesempatan untuk tumbuh, prestasi, dan keanggotaan, juga menjadi motivasi bagi bawahan dalam hubungan stewardship. Prinsipal dalam hubungan ini mengharapkan tanggung jawab bersama yang sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh steward. Meskipun kontribusi keduanya berbeda secara kualitatif dan sulit untuk diukur secara langsung, perbandingan dan pertanggungjawaban yang dijalani bersama diharapkan dapat menghasilkan sinergi dan pertumbuhan bagi organisasi (James et al. 1997).

2.3 Efektivitas dan Sistem Pengendalian Internal

2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Tiap lembaga usaha ataupun organisasi mempunyai tujuan dalam berbisnis untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya dan mampu mempertahankan usahanya dalam jangka waktu yang lama. Untuk mencapai hal tersebut suatu lembaga usaha harus memiliki pengendalian internal yang baik. Semakin baik pengendalian internalnya maka semakin bagus pula kualitas lembaga usaha tersebut. Pengendalian ini nantinya dapat mendukung lembaga tersebut untuk mengetahui apakah prosedur serta kebijakan sudah sesuai diterapkan sehingga mampu membuat lembaga tersebut bertahan lama dalam berbisnis.

Mulyadi (2001:183) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal melingkupi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan demi melindungi kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data

akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian Internal adalah suatu proses untuk memperoleh tujuan tertentu, akan tetapi pengendalian internal bukanlah suatu tujuan, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Uraian ini dipertajam oleh Mardi (2011) menjelaskan bahwa pengendalian internal mempunyai makna sempit dan makna luas. Dalam makna sempit, pengendalian internal disamakan dengan *internal check* yang merupakan prosedur pemeriksaan ketelitian data administrasi. Namun demikian dalam arti luas, pengendalian internal disamakan dengan *management control*, yaitu suatu sistem yang meliputi seluruh metode yang digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan perusahaan. Pengendalian Internal harus dilaksanakan seefektif pada suatu perusahaan untuk menghindari dan mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan bahkan penyelewengan. Pada perusahaan kecil, pengendalian masih dapat dilaksanakan langsung oleh pimpinan perusahaan. Namun semakin besar perusahaan, dimana ruang gerak dan kewajiban yang harus dilakukan semakin kompleks, menjadikan pimpinan perusahaan tidak untuk melakukan pengendalian langsung, maka suatu pengendalian internal dibutuhkan untuk dapat memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa tujuan perusahaan telah tercapai.

Dari bermacam definisi Pengendalian internal berikut dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang bertujuan untuk menggapai cita-cita organisasi, baik dalam mengelola serta melindungi seluruh harta benda organisasi secara efektif dan efisien dengan melaksanakan dan mempraktikkan dengan tepat kebijakan yang sudah dibuat oleh suatu organisasi baik dilakukan oleh manusia maupun dengan sistem. Cita-cita organisasi dapat tercapai dengan bergantung pada suksesnya penerapan pengendalian internal, semakin baik penerapan pengendalian internal maka akan semakin baik pula organisasi tersebut dalam menjalankan usahanya. Sehingga penerapan pengawasan yang ketat mampu menciptakan organisasi jauh dari tindak kecurangan yang mampu merugikan usaha tersebut.

2.3.2 Unsur- Unsur Pengendalian Internal

Untuk mencapai tujuan pada suatu entitas, diperlukan unsur-unsur yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) dan juga sebagai tolak ukur dari pengujian efektivitas penyelenggaraan SPIP. Penerapan SPIP yang efektif diharapkan mampu melahirkan keadaan dimana kebiasaan pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatannya dilaksanakan sejak awal kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya kecurangan serta meminimalisasi terjadinya tindakan yang dapat merugikan

perusahaan. Pengendalian internal memiliki beberapa unsur yang sangat penting dalam pengelolaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri atas lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian memiliki fungsi sebagai payung bagi keempat komponen pengendalian internal lainnya. Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya tidak akan menghasilkan pengendalian yang efektif. Pemimpin Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian atas tindakan, kebijakan atau prosedur yang kondusif dan positif mengenai penerapan pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut. Berikut adalah subkomponen dari lingkungan pengendalian, yaitu:

a. Penegakan integritas dan nilai etika

Penetapan nilai-nilai etika dalam praktiknya dituangkan dalam bentuk kode etik dengan tujuan untuk membentuk suatu komunitas yang solid dimana didalamnya memiliki sikap dan perilaku yang sama dalam menghadapi kondisi atau situasi tertentu dalam organisasi. Dengan dilaksanakannya aturan perilaku dan kode etik oleh seluruh pegawai diharapkan mampu berdirinya budaya organisasi yang diselimuti dengan nilai-nilai etika sehingga mampu mencapai tujuan instansi. Dalam menjalankan integritas dan nilai etika, pimpinan instansi sekurang-kurangnya melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menerapkan aturan perilaku.
- 2) Memberikan contoh yang baik dan menegakkan tindakan disiplin terhadap pelaksanaan aturan perilaku pada tiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah.
- 3) Menegakkan tindak disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
- 4) Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian internal.
- 5) Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Merupakan aspek utama untuk dapat berkinerja, sehingga komitmen terhadap kompetensi itu penting, jika diabaikan maka akan berakibat ketidakmampuan pegawai dalam memenuhi sasaran kinerjanya. Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
- 2) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.

- 3) Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
 - 4) Memilih pemimpin instansi pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah.
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- Kemampuan seorang pemimpin dalam sebuah instansi pemerintah diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif dimana dapat mendorong proses pegawai yang termotivasi agar mau bekerja untuk mencapai tujuan instansi. Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
- 1) Mempertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan.
 - 2) Menerapkan manajemen berbasis kinerja
 - 3) Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
 - 4) Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.
 - 5) Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.
 - 6) Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.
- d. Pembentukan struktur organisasi
- Dalam pembentukan organisasi perlu dipertimbangkan ukuran dan sifat dari kegiatan organisasi serta pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
- 1) Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi pemerintah.
 - 2) Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam instansi pemerintah.
 - 3) Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah.
 - 4) Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.
 - 5) Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
- Pelaksanaan ini hendaknya ditata secara berjenjang dalam rangka mencapai efektif dan efisiensi kegiatan dengan cara mempertimbangkan tingkat risiko pada tiap-tiap pendelegasian. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah.

- 2) Pegawai yang diberi wewenang, memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam instansi pemerintah yang bersangkutan.
 - 3) Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
- f. Kebijakan perihal Sumber Daya Manusia
- Meskipun dari banyaknya pengendalian yang diterapkan pada suatu entitas, tidak menutup kemungkinan akan rusak sistemnya oleh karyawan yang tidak jujur ataupun tidak kompeten. Namun demikian, dengan karyawan yang kompeten dan jujur juga dapat terganggu kinerjanya sebagai akibat dari perasaan tidak puas, bosan, ataupun masalah pribadi lainnya. Maka sumber daya manusia dianggap penting untuk keberhasilan sebuah entitas (pengendalian), metode atau kebijakan guna mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan dan memberikan kompensasi kepada karyawan merupakan suatu bagian yang dianggap penting dari pengendalian internal. Sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian karyawan.
 - 2) Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen.
 - 3) Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- g. Perwujudan pengawasan intern yang efektif
- Peran aparat pengawasan intern pemerintah dapat terwujud apabila auditor dapat memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan fungsi serta tugas instansi pemerintah. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 - 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 - 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola dalam menjalankan tugas dan fungsi instansi.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait sebagaimana diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terakut atau keselarasan dan keharmonisan yang terpadu antar instansi pemerintah akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dalam memberikan pelayanan kepada publik.

2. Penilaian Risiko

Suatu tindakan yang dilakukan oleh pemimpin instansi pemerintah guna mengidentifikasi risiko dengan cara menggunakan metodologi yang sesuai untuk mencapai tujuan instansi, menggunakan mekanisme yang memadai untuk

mengenali resiko serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Pemimpin instansi pemerintah juga harus melakukan analisis risiko dengan tujuan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya terhadap pencapaian tujuan instansi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Dalam rangka menjalankan penilaian risiko, seorang pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Pengendalian

Merupakan suatu kebijakan atau prosedur untuk membantu memastikan bahwa kinerja manajemen dapat terlaksana sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan ini mencakup aktivitas yang beragam seperti proses persetujuan, pengesahan, verifikasi, rekonsiliasi, review kinerja operasional, pemisahan tugas, pengamanan aset dan lain sebagainya. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri atas:

a. Pemisahan Tugas

Merupakan pemisahan fungsi ataupun pembagian kerja yang terbagi menjadi 2 bentuk paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas seperti: (1) pekerjaan yang berbeda harus dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula; (2) harus ada pemisahan tugas antara karyawan yang menangani langsung aset secara fisik (operasional). Rasionalisasi dari pemisahan tugas adalah ketika seorang karyawan memiliki tugas yang seharusnya mampu memberikan dasar yang memadai guna mengevaluasi pekerjaan karyawan lainnya, maka hasil pekerjaan seorang karyawan dapat diperiksa silang (*cross check*) kebenarannya oleh karyawan lain. Ketika seorang karyawan bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan, biasanya akan berpotensi munculnya kesalahan ataupun kecurangan yang akan meningkat. Maka pemisahan tugas dinilai sangat penting ketika pekerjaan yang berbeda harus dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula hanya untuk keberhasilan entitas.

b. Otoritas yang Tepat atas Transaksi

Otorisasi yang tepat dianggap penting agar pengendalian berjalan dengan baik. Pengendalian internal memiliki karakteristik yang paling utama yaitu penetapan tanggung jawab pada tiap karyawan dimana mampu bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu yang telah dipercayakan kepadanya. Pengendalian atas suatu pekerjaan tertentu akan menjadi lebih efektif jika hanya ada satu orang saja yang bertanggungjawab atas sebuah tugas tersebut.

c. Dokumen dan Catatan yang Memadai

Merupakan suatu objek fisik dimana transaksi akan dicatat dan diikhtisarkan. Sebuah dokumen akan memberikan bukti bahwa peristiwa ekonomi ataupun transaksi bisnis telah terjadi yang dibuat ketika transaksi telah terjadi pula. Dengan cara menyantumkan atau memberikan tanda tangan ke dalam sebuah dokumen serta orang yang bertanggungjawab atas terjadinya sebuah transaksi

atau peristiwa mampu diidentifikasi dengan mudah. Fungsi lain dari dokumen adalah sebagai pengantar informasi ke seluruh bagian organisasi yang harus mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh aset telah dikendalikan dengan pantas serta transaksi telah dicatat dengan tepat. Sebuah dokumen juga harus bernomor urut tercetak untuk mencegah terjadinya pencatatan transaksi secara berganda dan terjadinya transaksi yang tidak tercatat ataupun menghindari terjadinya transaksi fiktif dan dapat dipertanggungjawabkan.

d. **Pengendalian Fisik atas Aset dan Catatan**

Sebuah aset dan catatan harus dilindungi untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai. Jika tidak dilindungi dengan memadai maka rentan untuk dapat dicuri, rusak, hilang, diselewengkan ataupun disalahgunakan. Demikian juga dengan catatan jika tidak dilindungi maka akan mudah untuk dicuri. Karna hal ini mampu mengganggu proses pencatatan akuntansi dan operasi normal perusahaan.

e. **Pemeriksaan Independen atau Verifikasi Internal**

Prinsip ini terdiri atas peninjauan ulang, perbandingan serta pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda. Untuk memperoleh manfaat maksimum dari pengecekan independen atau verifikasi internal, maka: (1) verifikasi seharusnya dilakukan secara berkala ataupun bisa dilakukan dadakan; (2) verifikasi dilakukan oleh seorang independen; (3) ketidaksesuaian serta kekecualian harus dilaporkan ke tingkatan manajemen yang mampu mengambil tindakan korektif secara tepat dan cepat.

4. Informasi dan Komunikasi

Seorang pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif dalam bentuk dan waktu yang tepat dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Berbeda dengan pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah yang dilaksanakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal dengan cara menggunakan daftar uji pengendalian internal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertauran pemerintah ini, dimana dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah ataupun pihak eksternal pemerintah. Penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan oleh pemimpin instansi berhubungan dengan

aktivitas pemantauan untuk menentukan bahwa sebuah pengendalian sudah terlaksana sebagaimana yang diharapkan serta dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam suatu instansi pemerintah. Informasi yang dinilai bermula dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, maupun umpan balik dari personil operasional dan lainnya. Kemudian audit internal timbul sebagai suatu cara untuk mengatasi risiko yang meningkat akibat semakin pesatnya perkembangan dunia usaha serta tidak dapat diprediksi sehubungan dengan era globalisasi, sehingga sumber informasi yang bersifat tradisional dan informasi sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan para manajer yang bertanggungjawab terhadap hal-hal yang tidak teramati. Pada akhirnya hasil audit internal diharapkan mampu meningkatkan reliabilitas informasi tentang keadaan dalam unit-unit yang diawasinya.

Disamping meningkatkan keandalan informasi dan memastikan dipatuhinya kebijakan manajemen, lingkup pekerjaan audit internal meliputi, perlindungan terhadap aset perusahaan serta penilaian terhadap apakah penggunaan sumber daya telah dilakukan secara ekonomis dan efisien. Dengan audit internal yang dilakukan secara teratur dapat mencegah beberapa masalah seperti, manajemen mampu mengetahui dan mengatasi masalah serta sebabnya sebelum masalah tersebut berkelanjutan, atau dengan cepat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya, penyebab bersumber darimana serta mengambil langkah yang efektif guna mengatasinya. Dengan begitu audit internal sudah menjadi suatu alat bagi pemimpin perusahaan guna memantau pemeriksaan internal tentang segala kebijakan, prosedur serta berbagai permasalahan entitas secara terperinci dibanding dengan pemeriksaan eksternal (akuntan publik).

2.3.3 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:129) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
 Dalam sebuah entitas manajemen membutuhkan informasi yang teliti, dapat dipercaya, dan tepat pada waktunya untuk mengelola seluruh kegiatan perusahaan.
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
 Dengan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi dapat mencegah terjadinya barang-barang perusahaan yang hilang karna dicuri, disalahgunakan, rusak karna kecelakaan ataupun disebabkan hal lain yang dapat merugikan perusahaan.
3. Mendorong efisiensi
 Mekanisme pengendalian internal yang diasosiasikan dengan personil dan kegiatannya, mempunyai tujuan untuk menghindari atau mencegah terjadinya berbagai peristiwa atau keadaan yang mengakibatkan timbulnya *unefisiensi* operasi manajemen.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Kebijaksanaan prosedur-prosedur dan peraturan pelaksanaan telah ditetapkan oleh manajemen sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian internal yaitu menjaga suatu entitas agar tetap dapat berjalan dan tercapainya tujuan usaha yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan tujuan diatas baik suatu organisasi atau lembaga usaha diharapkan dapat menjaga harta dan aset mereka untuk keberlanjutan usahanya. Adanya arus aset dan harta yang terorganisir dinilai mampu mengurangi risiko kecurangan yang dapat membuat suatu usaha mengalami kebangkrutan.

2.3.4 Efektivitas

2.3.4.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Ravianto (2014:11) pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, jika suatu pekerjaan dapat terselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya ataupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Sedangkan menurut Mardiasmo (2017:134) efektivitas adalah sebuah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi telah mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah sedemikian rupa sehingga mekan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Faktor penentu efisiensi dan efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
2. Faktor struktur organisasi yaitu berupa susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
3. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
4. Faktor pemimpin dalam arti kemampuan dalam mengkombinasikan keempat faktor-faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

2.3.4.2 Pengukuran Efektivitas

Musyarofah & Agustin (2007:131) menjelaskan bahwa Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril

daerah. Dalam pengertian efektivitas penerapan pengendalian internal merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dengan membandingkan antara realisasi pemungutan retribusi terhadap target pemungutan retribusi. Berikut adalah formula atau rumus untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Retribusi\ Pasar}{Target\ Retribusi\ Pasar} \times 100\%$$

Untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas dalam penerimaan retribusi pasar adalah dengan melihat tabel kriteria dibawah ini:

Tabel 2. 1 Kriteria Tingkat Efektivitas

Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Pengendalian yang dijalankan akan semakin efektif jika mampu untuk menjadi infrastruktur bagi entitas dan bagian dari intisari perusahaan. Dengan begitu akan mendorong inisiasi kualitas, menghindari biaya yang tidak penting, dan mekan respons cepat terhadap perubahan kondisi.

2.4 Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar

2.4.1 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Bab IV Retribusi, bagian pertama objek dan golongan retribusi yaitu:

- 1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari sebagai berikut:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - f. Retribusi pelayanan pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - k. Retribusi pengolahan limbah cair
 - l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - m. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
 - n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis jasa usaha terdiri atas:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelelangan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat khusus parkir
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g. Retribusi rumah potong hewan
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - j. Retribusi penyebrangan di air; dan
 - k. Retribusi penjualan produk usaha daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri atas:
- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
 - b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - c. Retribusi izin gangguan
 - d. Retribusi izin trayek; dan
 - e. Retribusi izin usaha perikanan.

2.4.2 Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi merupakan salah satu pendapatan terpenting selain pajak. Berbicara tentang retribusi, salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah retribusi pasar yang merupakan jenis dari retribusi jasa umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun

2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor, pasar merupakan suatu kawasan tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha yang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang atau menawarkan jasa. Sedangkan retribusi adalah pungutan berupa uang oleh pemerintah sebagai balasan jasa. Jika digabungkan retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan bagi pedagang yang menggunakan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah baik tetap maupun tidak tetap di wilayah pasar yang terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir.

Dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar adalah aksi pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa, fasilitas, serta prasarana pasar yang telah disediakan khusus untuk pedagang dimana sebesar-besarnya jumlah penerimaan retribusi digunakan sebagai sumber kas daerah.

2.4.3 Objek Retribusi Pasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor, objek retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional ataupun pasar sederhana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun yang termasuk dalam objek retribusi pasar di Pasar Tohaga Parung, adalah sebagai berikut:

1. Kios, merupakan bangunan di pasar yang memiliki atap serta dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari langit-langit sampai lantai yang digunakan untuk berjualan.
2. Los, merupakan bangunan yang berada di dalam lingkungan pasar dengan memiliki bentuk memanjang tanpa dilengkapi dinding.
3. Pelataran, merupakan halaman yang berada di lingkungan pasar untuk menggelar dagangan.

2.4.4 Subjek dan Wajib Retribusi Pasar

Berikut adalah subjek dan wajib retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum:

1. Subjek Retribusi Pasar

Subjek retribusi pasar adalah orang dan atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola oleh pemerintah daerah.

2. Wajib Retribusi Pasar

Wajib retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi.

2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Sebelumnya

Dalam setiap penelitian tentunya penelitian terdahulu merupakan bagian yang penting. Penelitian terdahulu dijadikan referensi oleh setiap peneliti baru. Dari referensi ini nantinya akan memicu munculnya ide-ide baru sebagai bahan penelitian baru, serta peneliti baru mampu membedakan variabel-variabel mana yang nantinya akan menjadi pilihan sebagai bahan penelitian.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Cornelia Desiana Matani & Linda Hutajulu (2020) Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung Di Kota Jayapura	Variabel Independen: Kompetensi, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampung	Independen: - Pengetahuan, kemampuan meningkatkan pengetahuan, keahlian teknis, kemampuan mencari solusi, inisiatif dalam bekerja, keramahan dan kesopanan. - Keyakinan terhadap tujuan organisasi, kesetiaan dalam organisasi, mengusulkan rencana anggaran. - Struktur organisasi, pengamanan aset, otorisasi. Dependen: - Tindak lanjut review/saran, kepatuhan dalam pelaporan.	Penelitian ini menggunakan <i>Structural Equation Model</i> (SEM) dengan metode <i>Partial Least Square</i> (PLS) dengan menggunakan software <i>Warp Pls</i> 6.0.	Terdapat pengaruh kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, dna sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di kota Jayapura. Serta tidak terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kampung di kota Jayapura.
2.	Tri Susilo Wahyu Aji & Suryo Pratolo (2018)	Variabel Independen: Politik Dinasti dan Sistem	Independen: - Variabel dummy.	Penelitian ini menggunakan metode analisis data	Politik dinasti tidak berpengaruh signifikan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi : Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015	Pengendalian Internal Variabel Dependen: Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi	- Rumus skala rasio dari jumlah penegakkan SPI. Dependen : - Skor Evaluasi Kinerja Penyelenggara n Pemerintah Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggara n Pemerintah Daerah (LPPD).	regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 15.	terhadap kinerja pemerintahan. Berbeda dengan Sistem Pengendalian Internal terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan.
3.	La Ode Aslim & Bakti (2018) Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan)	Variabel Independen: Kualitas Pelayanan Variabel Dependen: Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	- Keandalan, daya tanggap, kepastian, empati, dan bukti fisik. - Penerimaan retribusi menurut penilaian sebagian besar sampel penelitian ini belum optimal.	Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan desain survei. Pendekatan kuantitatif (mayor) yang didukung kualitatif (minor).	Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi daerah.
4.	Yeni Vera Fibriyanti (2017) Analisis Sistem Informasi Akuntansi	Variabel: Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan	- Ketersediaan sistem - Keamanan sistem yang dilindungi	Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara melakukan	Fungsi-fungsi dalam Sistem Informasi Akuntansi Penggajian belum sesuai dengan teori

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan	Efektivitas Pengendalian Internal	- Dapat dipelihara - Integrasi sistem bersifat lengkap - Lingkungan pengendalian - Penilaian risiko - Aktivitas pengendalian - Informasi dan komunikasi - pengawasan	tanya jawab secara langsung kepada bagian keuangan.	karna ada rangkap jabatan oleh karyawan serta perusahaan sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik.
5.	Tuti Herawati (2014) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah Pemda Cianjur	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Independen: - Lingkungan pengendalian - Penilaian risiko - Aktivitas pengendalian - Informasi dan komunikasi akuntasni - Pemantauan Dependen: - Dapat dipahami - Relevan - Keandalan - Dapat dibandingkan	Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (<i>path analysis</i>) dengan menggunakan bantuan <i>Software Lisrel 8.80 for Windows</i> .	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
6.	Rilia Gita Yostina (2020) Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Kaitannya Dengan Prinsip 5C Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMDES)	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Variabel Dependen: Prinsip 5C Pemberian Kredit	Independen: - Lingkungan Pengendalian - Penilaian risiko - Aktivitas pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan pengendalian Dependen: - Watak - Kemampuan - Modal - Agunan	Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik (SPSS 25) dan skala Likert	Sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian kredit

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Kurnia Abadi DI Desa Tonjong		- Kondisi		
7.	Pradiktya Yuliandana (2020) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penarikan Retribusi Pasar	Variabel: Sistem Pengendalian Internal dan Penarikan Retribusi Pasar	: - Struktur Organisasi - Sistem wewenang dan prosedur pencatatan - Pelaksanaan praktik kerja yang sehat - Karyawan yang berkualitas: - Perencanaan - Pengorganisasian - Pelaksanaan - pengawasan	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif	Sistem pengendalian internal atas penarikan retribusi pasar cukup efektif, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki yaitu pegawai yang berkualitas dan pada aspek prosedur pencatatan dalam penerapan pembukuan atas ceklist harian tahun 2019.
8.	Claudio V. Munaiseche, Ventje Ilat, Robert Lambey (2018) Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Dan Penerimaan Retribusi Parkir Di Dinas	Variabel Independen: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: - Kinerja - Penerimaan Retribusi Parkir	Independen: - Lingkungan Pengendalian - Penilaian risiko - Kegiatan pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan Dependen: - Kualitas pekerjaan - Kuantitas yang dihasilkan - Ketepatan waktu	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	Penerapan pengendalian internal atas kinerja dikategorikan cukup efektif dan penerapan pengendalian internal terhadap penerimaan retribusi dikategorikan belum efektif karna belum ada prosedur yang jelas terhadap

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Perhubungan Kota Manado		- Efektivitas penggunaan sumber daya organisasi - Kemandirian - Perencanaan - Pengorganisasian - Pelaksanaan - Pengawasan		sistem bagi hasil.
9.	Fopi Soraya (2021) Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pemungutan Dan Penyetoran Retribusi Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan	Variabel: Sistem Pengendalian Internal dan Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar	- Lingkungan Pengendalian - Penilaian risiko - Aktivitas pengendalian - Informasi dan komunikasi - Pemantauan pengendalian - Perencanaan - Pengorganisasian - Pelaksanaan - Pengawasan	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif	Diperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal atas pemungutan dan penyetoran retribusi pasar di DISPERINDAG sudah memadai dibuktikan dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal
10.	Aditya Amanda Pane (2018) Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kecurangan : Survei Pada Pemprov Sumatera Utara	Variabel Independen: Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Variabel Dependen: Kecurangan	Variabel independen: - Lingkungan pengendalian - Penilaian risiko - Aktivitas pengendalian - Informasi dan komunikasi - Evaluasi Variabel Dependen:	Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengujian statistik analisis regresi.	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perilaku kecurangan.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			- Pencurian Aset - Salah Saji Laporan Keuangan - Korupsi		
11.	PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR /PRT/M/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	- Penegakan integritas dan nilai etika - Komitmen terhadap kompetensi - Kepemimpinan yang kondusif - Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan - Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat - Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pengelolaan/ pembinaan sumber daya manusia		

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (apip) yang efektif - Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait		

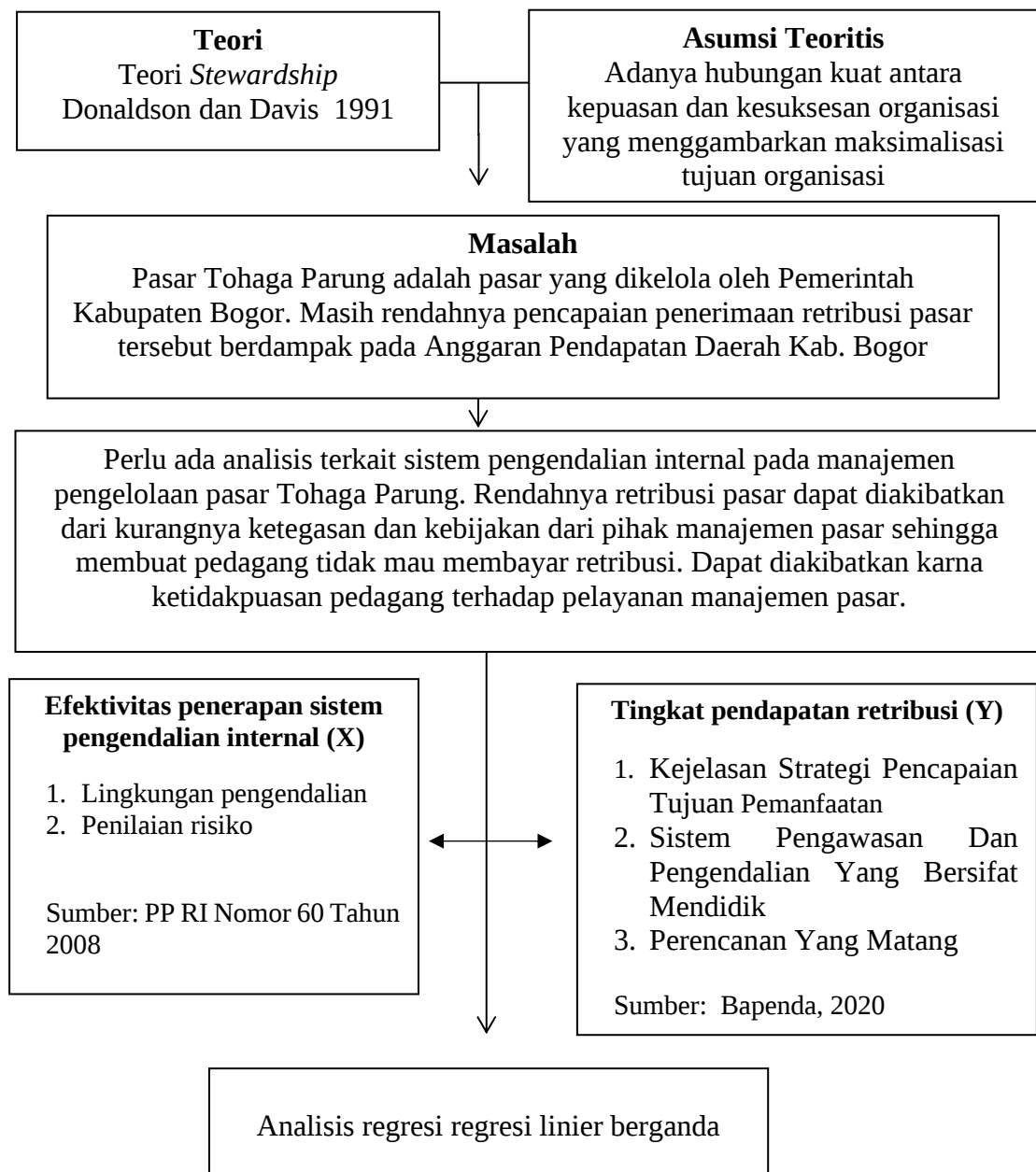
Sumber: Referensi, data diolah penulis (2023)

2.5.2 Kerangka Pemikiran

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Tohaga parung merupakan salah satu unit pada Perumda Pasar Tohaga Kabupaten Bogor yang memberlakukan penagihan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor. Retribusi pasar adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa peralatan, los, dan kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pasar ini merupakan salah satu retribusi daerah yang termasuk dalam jenis reribusi jasa umum. Karena itu dalam retribusi pasar, prinsip serta sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan serta biaya kebersihan. *Grand Theory* yang mendasari penelitian ini adalah Teori *Stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson (1991) yang menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajemen tidak termotivasi pada kepentingan-kepentingan individu melainkan lebih memfokuskan diri pada sasaran utama yang berupa kepen tingan organisasi. Pemerintah selaku *Stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *Principal* sebagai pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*Principal*) berdasarkan kepercayaan, sesuai dengan tujuan organisasi. Filosofi mengenai teori *stewardship* didasarkan pada sifat manusia yang mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, dapat dipercaya, memiliki integritas serta berlaku jujur. Secara tidak langsung teori ini menggambarkan hubungan yang erat antara kepuasan

dengan keberhasilan organisasi, dimana hal tersebut menjadikan teori ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian pada akuntansi organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan maupun organisasi *non profit* lainnya. Teori ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha semaksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Pada penelitian ini faktanya masih terdapat permasalahan dalam tingkat pendapatan retribusi pasar yaitu tidak tercapainya target realisasi retribusi pasar tahun anggaran 2018, 2020, 2021 dan 2022 pada Perumda Pasar Tohaga Parung. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan analisis untuk mengetahui apakah dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang efektif mampu mempengaruhi tingkat pendapatan retribusi pasar pada Perumda Pasar Tohaga Parung. Serta untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi retribusi pada Perumda Pasar Tohaga Parung.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka pemikiran serta penelitian Febby Haryanti & Decky Hendarsyah (2021) menjelaskan bahwa hasil penelitian sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi alat pemadam api ringan, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan perkiraan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_0 : Efektivitas penerapan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan retribusi pada Perusahaan Umum Daerah pasar Tohaga Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

H_1 : Efektivitas penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan retribusi pada Perusahaan Umum Daerah pasar Tohaga Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor